



KR-Antara/Asprilla Dwi Adha

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir memberikan sambutan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah di Jakarta, Jumat (18/8/2023).

Muhammadiyah Rumuskan Gerakan Atasi Krisis Lingkungan

JAKARTA (KR) - Majelis Lingkungan Hidup (MLH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Jakarta, Jumat-Minggu (18-20/8), untuk merumuskan strategi gerakan dalam mengatasi dan memitigasi krisis lingkungan yang terjadi di dewasa ini.

"Dalam Rakernas akan banyak pandangan yang bersifat kebijakan, langkah, dan pandangan keilmuan yang objektif bagaimana menjaga lingkungan hidup kita, baik dalam skala nasional maupun global," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir saat membuka Rakernas, di Jakarta, Jumat (18/8).

Haedar mengatakan, dampak kerusakan lingkungan membuat bencana alam semakin sering terjadi di berbagai belahan dunia. Cuaca ekstrem, banjir bandang, kebakaran hutan, hingga polusi

udara menjadi fenomena sehari-hari.

Ia memandang pentingnya pendekatan teologis untuk mencegah dan meminimalisasi kerusakan lingkungan. Sebab, kerusakan yang terjadi akibat dari ketamakan manusia dalam mengeksploitasi alam. "Problem-problem ini bermula dari relasi yang buruk antara manusia dengan lingkungan," katanya.

Guru Besar Ilmu Sosiologi ini menjelaskan, saat ini manusia hidup di era antroposen, dimana perilaku dan cara berpikir manusia

mempengaruhi lingkungan hidup. "Sehingga ketika ada banyak kerusakan, kembali pada seberapa jauh kita berkontribusi pada hancurnya ekosistem dan perubahan iklim yang nanti justru akan berbalik pada manusia sendiri baik lahir maupun fisik," kata Haedar.

Meluasnya penemuan ilmu pengetahuan, teknologi dan modernisasi, kata Haedar, ikut bertanggung jawab pada kerusakan lingkungan. Kemampuan manusia menemukan seluk beluk alam semesta menjadikan dominasi terhadap bumi, bahkan melakukan eksploitasi besar-besaran. Relasi manusia yang dulu saling terkait dengan alam juga semakin berjarak.

Secara kosmologis, menurutnya, modernisasi bahkan merusak kearifan lokal dari kelompok tradisional yang selama ini merawat alam dan lingkungan hidup. Harasrat manusia yang tak terpuaskan

juga ikut dieksploitasi oleh kapitalisme yang digerakkan oleh segelintir manusia yang secara terbatas memiliki perangkat ilmu dan alat. "Nah kapitalisme itu kemudian bertumbuh kembang dalam kosmologi yang lebih fungsional, maka lahirlah pragmatisme dan lain-lain yang menjadikan sumber daya alam bisa kita eksploitasi sebanyak-banyaknya. Itulah era fungsional, hanya berpikir kegunaan dan keuntungan," katanya.

Ketua MLH PP Muhammadiyah Azrul Tanjung menyebut, Rakernas dilaksanakan karena keprihatinan Muhammadiyah atas segala kerusakan serta dampak yang ditimbulkan. Langkah afirmatif akan dilaksanakan pasca-Rakernas, seperti mendorong kurikulum di sekolah Muhammadiyah tentang pengelolaan sampah terpadu, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan. (Ant)-d

dikonsumsi masyarakat Indonesia, yakni beras, juga harus diantisipasi ketersediaannya setelah India memutuskan untuk menghentikan ekspor beras demi ketahanan pangan negara.

Menurut Presiden, penyediaan lumbung pangan merupakan sebuah keharusan untuk cadangan strategis maupun ekspor jika ketersediaan komoditas pangan melimpah.

Namun demikian, Jokowi menjelaskan bahwa proyek lumbung pangan memang tidak langsung berhasil pada penanaman perdana. "Tanaman pertama biasanya gagal, nanam kedua masih paling-paling bisa berhasil 25 persen. Ketiga, baru biasanya, keenam, ketujuh itu baru pada kondisi normal," katanya.

Presiden mencontohkan bahwa salah satu proyek lumbung pangan di Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara baru mencapai produktivitas yang optimal pada penanaman ketiga kali. "Problem-problem di lapangan itu tidak seperti semudah yang kita bayangkan. Jadi semuanya akan diperbaiki. Dan semuanya harus dievaluasi, dikoreksi, harus diulang," tegasnya. (Ant/Has)-f

JAWAB KRITIK SOAL 'FOOD ESTATE'

Jokowi Sebut Tak Semudah yang Dibayangkan

JAKARTA (KR) - Presiden Jokowi menegaskan, pembangunan lumbung pangan atau 'food estate' tidak semudah yang dibayangkan, karena produktivitas dari tanaman pada kali pertama biasanya gagal. Penegasan tersebut menanggapi adanya kritikan tentang penyalahgunaan kebijakan dari proyek lumbung pangan.

"Itu cadangan, baik cadangan strategis maupun nanti kalau melimpah betul, enggak apa-apa untuk ekspor karena negara lain membutuhkan. Sehingga dalam rangka ke sana, kalau supaya tahu membangun 'food estate', membangun lumbung pangan itu tidak semudah yang bapak/ibu bayangkan," tandas Jokowi usai menghadiri Hari Konstitusi sekaligus HUT ke-78 MPR RI di Kompleks Gedung MPR/ DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (18/8).

Presiden menjelaskan bahwa lumbung pangan merupakan solusi untuk mengantisipasi krisis pangan, mengingat semua negara di seluruh kawasan menghadapi krisis tersebut. Hal itu ditandai dengan naiknya harga gandum secara signifikan di hampir semua negara akibat dampak dari perang Ukraina-Rusia. Selain itu, komoditas pangan utama yang

DUGAAN KORUPSI TRUK ANGKUT KPK Periksa Direktur Basarnas

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Kesiapsiagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Agus Haryono sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan truk angkut personel dan rescue carrier vehicle tahun 2014 di Basarnas.

Pada saat pemeriksaan tersebut penyidik KPK turut memeriksa Pegawai Bidang Rencana dan Standarisasi Basarnas, Ade Dian Permana. "Kedua saksi hadir dan didalam pengetahuannya antara lain terkait dengan jabatan para saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kepanitiaan lelang untuk proyek pengadaan truk angkut personel dan rescue carrier vehicle tahun 2014 di Basarnas," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Jumat (18/8).

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai apa saja temuan penyidik dalam pemeriksaan terhadap kedua pegawai Basarnas tersebut.

Seperti diketahui KPK pada Kamis, 10 Agustus mengumumkan telah memulai penyidikan baru terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Basarnas tahun 2014. Ali juga menambahkan, kasus ini berbeda dengan perkara dugaan korupsi yang melibatkan mantan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi. (Ful)-d

MENUJU PEMILU BERKUALITAS

Bawaslu Luncurkan Pos Konsultasi Hukum

JAKARTA (KR) - Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) meluncurkan Pos Konsultasi Hukum bagi masyarakat Indonesia untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dan demokratis. Peluncuran Pos Konsultasi Hukum ini bertepatan dengan peringatan Hari Konstitusi.

"Saya ucapkan selamat atas peluncuran Pos Konsultasi Hukum Bawaslu RI. Semoga dapat mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam cuplikan video yang ditayangkan melalui kanal YouTube Bawaslu RI

Jakarta, Jumat (18/8).

Menurutnya, inti dari kesepakatan itu dalam konteks pemilu adalah adanya hak partisipasi dari seluruh stakeholder dalam rangka menjalankan amanah konstitusi dengan semangat *fastabiqul khairat* atau dalam perlombaan-lomba dalam kebaikan.

"Untuk memberikan akses atau keadilan ke seluruh rakyat Indonesia dalam mewujudkan keadilan pemilu," ujarnya.

Sekjen Bawaslu RI Ichan Fuady menjelaskan, peluncuran Pos Konsultasi Hukum muncul dari adanya semangat Bawaslu RI dalam memberikan ruang bagi masyarakat umum untuk

memperoleh penjelasan mengenai kepemiluan. Pos Konsultasi Hukum ini juga, lanjut Fuady, bagi jajaran pengawas pemilu agar memiliki ruang untuk melakukan konsultasi dan atau memperoleh pertimbangan-pertimbangan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu dan pemilihan.

Ia menyebutkan tujuan diluncurkan Pos Konsultasi Hukum untuk mewujudkan layanan konsultasi yang cepat, mudah, transparan dan terintegrasi. Bawaslu juga ingin mewujudkan pelayanan prima yang akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). (Ant)-d

"Bawaslu ingin meningkatkan layanan publik dengan menyediakan sarana konsultasi hukum kepada masyarakat maupun jajaran pengawas pemilu yang membutuhkan informasi, pengetahuan atau pendapat hukum seputar hukum kepemiluan," tambah Fuady.

Ia berharap peluncuran Pos Konsultasi Hukum dapat meningkatkan mutu layanan publik yang dilakukan Bawaslu RI. Hal ini demi mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan terukur sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*. (Ant)-d

PERCEPAT DAN SELESAIKAN PERSOALAN PEMBANGUNAN Awal September, Wapres Berkantor di Papua

JAKARTA (KR) - Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin akan berkantor di Papua pada awal September 2023 bersama sejumlah menteri dan Panglima TNI. Hal itu dilakukan untuk mempercepat upaya pembangunan di sana dan juga menyelesaikan persoalan yang dihadapi pemerintah daerah.

"Tadi Bapak Menko PMK melaporkan beberapa hal penting kepada Wapres terutama yang terkait dengan hasil kunjungan beliau ke Papua. Kebetulan bahwa memang Wapres berencana berkunjung kembali ke Papua pada tanggal 4 September dan rencananya akan berkantor di sana dengan sejumlah menteri," kata Juru bicara Wapres Masduki Baidlowi usai mendampingi Wapres melakukan rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (18/8).

Masduki mengatakan, Wapres akan berkantor di Papua selama beberapa hari dan berkunjung ke sejumlah daerah di sana. Beberapa waktu lalu Wapres juga sudah berkunjung dan berkeliling ke sejumlah kota di Papua selama sepekan. Pada kunjungan September nanti,

Wapres akan didampingi Panglima TNI dan sejumlah menteri diantaranya Menko Polhukam, Menteri Koperasi, Menteri PUPR, dan Menteri Investasi.

Menurut Masduki, dalam kunjungan Wapres ke Papua beberapa waktu lalu, banyak persoalan yang dilaporkan belum selesai. Sehingga di Papua nanti Wapres akan menggelar sejumlah rapat penting salah satunya mendengar aspirasi para pelaksana tugas gubernur dan bupati.

Deputi Sekretariat Wakil Presiden Bidang Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai menambahkan, pada kunjungan nanti Wapres bersama para menteri dan pemda akan mencari solusi untuk memadukan pendekatan kesejahteraan dengan pendekatan keamanan yang efektif di Tanah Papua. Wapres juga akan berkunjung ke Biak untuk penanganan sanitasi dan persiapan Sail Teluk Cenderawasih.

Sementara itu Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan pentingnya pembangunan infrastruktur landasan pesawat di Bandara Sinak Papua, agar bandara itu bisa disinggahi pesawat berbadan besar seperti Hercules milik TNI. (Ant/Has)-f

PEMBAHASAN AMENDEMENT UUD 1945 Komisi III: Sebaiknya Setelah Pemilu

JAKARTA (KR) - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pembahasan terkait dengan amendemen UUD NRI Tahun 1945 sebaiknya setelah perhelatan Pemilu 2024. Hal tersebut untuk menghindari kecurigaan bahwa usulan tersebut sebagai manuver politik kepentingan oleh sejumlah pihak.

"Soal perlu tidaknya amendemen kembali UUD Tahun 1945 baiknya baru diskusikan setelah selesainya tahapan Pemilu 2024. Setelah Pemilu 2024, artinya sudah ada pemerintahan yang baru dan juga DPR periode baru sehingga tidak ada ruang kecurigaan akan adanya manuver politik perebutan kekuasaan semata," ujarnya dalam rilisnya di Jakarta, Jumat (18/8).

Selain itu, lanjutnya, untuk menjaga tahapan Pemilu 2024 agar berjalan lancar guna menghindari konflik terkait dengan pembahasan tersebut. "Kita juga harus berkomitmen agar seluruh tahapan Pemilu 2024 berjalan dengan lancar tanpa diinterupsi silang sengketa soal amendemen tersebut," ucapnya.

Sebelumnya, Rabu (16/8), usulan amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) disampaikan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI Tahun 2023.

Bambang Soesatyo dalam pidatonya menyinggung ada beberapa masalah yang belum ada jalan keluar konstitusionalnya, terutama setelah amendemen ke-4 UUD 1945. Problem itu di antaranya terkait dengan kelembagaan, tugas pokok dan fungsi MPR. (Ant/Has)-f

KONTRAK SIAP DITEKEN

Tol IKN Bisa Dijadikan Runway

JAKARTA (KR) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan, kontrak Proyek Jalan Tol Akses IKN Nusantara Seksi 6A dan 6B yang dalam kondisi darurat berperan sebagai landasan (runway) pesawat siap ditandatangani pada Agustus 2023 ini.

"Untuk Seksi Tol 6A dan 6B lelangnya sudah hampir selesai, kita harapkan penandatanganan kontraknya dapat ditandatangani pada Agustus ini," ujar Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga di Jakarta, Jumat (18/8).

Danis mengatakan, Jalan Tol Seksi 6A dan 6B tersebut selain berfungsi sebagai jalan tol, juga dalam kondisi darurat dapat difungsikan sebagai landasan pesawat terbang. Proyek Tol Seksi 6A yakni Segmen Riko-Rencana Outer Ring Road IKN dan Seksi 6B Segmen Rencana Outer Ring Road-Simpang 3 ITCI.

Proyek pembangunan Jalan Tol Akses IKN Seksi 6A dan 6B tersebut masuk dalam Gelombang (Batch) Pembangunan Kedua IKN Nusantara. Adapun tiga paket pekerjaan lainnya yang masuk dalam Gelombang Kedua Pembangunan di IKN Nusantara yakni paket Pembangunan Sisi Landasan Udara Bandara Very Very Important Person (VVIP). Lalu paket Jalan Akses Bandara VVIP, dan Jalan Tol Akses IKN Seksi 5B. Total nilai tiga paket pekerjaan tersebut mencapai Rp 5,7 triliun.

Dalam kesempatan sama, Danis juga mengungkapkan bahwa Gelombang Pembangunan Pertama dari tahun 2020 sampai Maret 2023 yakni 39 paket total pagu terkontrak Rp 24,16 triliun, progres fisiknya mencapai 40,01 persen. (Ant/San)-d



KR-Antara/Hafidz Mubarak A

ASN JAKARTA WFH: Pegawai Pemprov DKI Jakarta keluar saat jam pulang kerja di depan Balai Kota, Jakarta, Jumat (18/8/2023). Pemprov DKI Jakarta melakukan uji coba kebijakan 'work from home' (WFH) 50 persen bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta mulai 21 Agustus 2023 untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara serta memberikan kenyamanan saat KTT ASEAN berlangsung di Jakarta.